



KEPUTUSAAN KEPALA BAPPEDAA KABUPATEN JEMBRANA

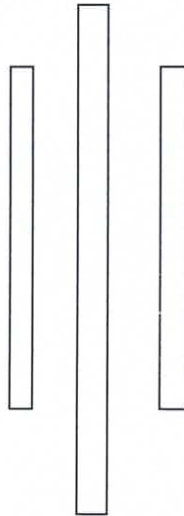
NOMOR : 005/16 / BAPPEDA / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN BAPPEDAA KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2025 - 2026



BAPPEDA KABUPATEN JEMBRANA

2025



පිටිබිඳු කැපුණු කිවුණ
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
පානච්චිපුණු කැපිපිපුණු කිවුණ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
රජයේ සේවයේ ආගන්තුක පාලන ආයතන (පුනරුත්ථාපන සේවය)
Jalan Surapati NO. 3 Negara, Telepon (0365) 41067

KEPUTUSAN KEPALA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR : 005/ 16 /Bappeda /2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 7);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Kabupaten Jember.
- c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Kabupaten Jember ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden no. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

Peraturan Menteri.....

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 7)

Peraturan Daerah

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana No. 51)
33. Peraturan Bupati Jembrana No.21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 21)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** IKU sebagaimana diktum PERTAMA digunakan acuan ukuran untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai tugas pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2026 .
- KETIGA** Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan Kepala Bappeda Nomor 005/ 21 / Bappeda/2024, Tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Bappeda dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 4 Januari 2025

Plt. Kepala Bappeda

Kabupaten Jembrana,



Wayan Sudiarta, SP

NIP.197006042000031010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Jemberana
Nomor : 005/ 16 /Bappeda /2025
Tanggal : 4 Januari 2025

1. Organisasi Perangkat Daerah : Bappeda
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (sasaran)	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan / Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian Program tahunan dengan Program RPJMD	100%	$\sum \frac{\text{Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Th.N}}{\sum \text{Dokumen yang telah ditetapkan dengan Perkada Th.N}} \times 100\%$ <p>Ket : Gambaran terkait Tersusunnya dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA</p>	- RPJMD - RKPD	- Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Data Pembangunan Daerah
2		Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	100%	$\sum \frac{\text{data dan dokumen perencanaan}}{\sum \text{data yang sesuai dengan RTRW}}$ <p>Ket : Gambaran ketersediaan data dan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	- Renja - DPA	- Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia